

Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Model *Fiscal Trend Monitoring System* (FTMS) Di Kota Magelang

**Nuwun Priyono¹,
Ari Nurul
Fatimah²,
Risma Wira
Bharata³, Siti
Arifah⁴,**

Tanggal Masuk:
Desember, 2020
Tanggal Revisi:
Desember, 2020
Tanggal diterima:
Desember, 2020

Mengutip ini sebagai:
Priyono, N., Fatimah,
A. N., Bharata, R. W.,
Arifah, S., (2020).
Analisis Kondisi
Keuangan Pemerintah
Daerah Dengan
Model *Fiscal Trend
Monitoring System*
(FTMS) Di Kota
Magelang. *Journal of
Publik and Business
Accounting*, 1(2). 1-
11

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kecenderungan antara faktor keuangan dan faktor lingkungan yang terjadi pada Pemerintah Kota Magelang. Data yang dianalisis adalah: APBD, laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan operasional. Analisis dilakukan dari tahun 2015-2019 dengan menggunakan model *Fiscal Monitoring System* (FTMS) di Pemerintah Kota Magelang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif berdasarkan data sekunder. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, yaitu: menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, rata-rata dan perhitungan persentase. Analisis model FTMS di Kota Magelang tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa faktor keuangan di Kota Magelang memiliki 4 indikator yang meliputi 9 sub indikator. Dari 9 sub indikator tersebut, 8 sub indikator memiliki trend yang mengembirakan dalam beberapa tahun pengamatan dan 1 sub indikator tidak menguntungkan. Sedangkan jika dilihat dari faktor lingkungan terdapat 5 sub indikator, 4 sub indikator menguntungkan dalam beberapa tahun pengamatan dan 1 sub indikator kurang menguntungkan.

Kata kunci: faktor keuangan, faktor lingkungan, FTMS, kondisi keuangan

Kata Kunci:

Abstract. *This study aims to identify and analyze trends between financial factors and environmental factors that occur in the Magelang City Government. The data analyzed are: APBD, budget realization reports, balance sheets, and operational reports. The analysis was carried out from 2015-2019 using the Fiscal Trend Monitoring System (FTMS) model in the Magelang City Government. The approach used in this research is a qualitative approach based on secondary data. The analysis technique in this research uses descriptive statistics, namely: presenting data in the form of tables, graphs, averages and percentage calculations. Analysis of the FTMS model in the City of Magelang in 2015-2019 shows that the financial factors in the City of Magelang have 4 indicators which include 9 sub indicators. Of the 9 sub indicators, 8 sub indicators have a favorable trend in several years of observation and 1 sub indicator is not profitable. Meanwhile, if seen from environmental factors, there are 5 sub indicators, 4 sub indicators that are profitable in several years of observation and 1 indicator is less profitable.*

Keywords: *financial factors, environmental factors, FTMS, financial conditions*

PENDAHULUAN

Kondisi keuangan pemerintah daerah harus selalu dikontrol dan dimonitor. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah khususnya kabupaten dan kota sudah memasuki era otonomi daerah. Dalam era ini pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar dalam mengelola anggaran dan keuangan yang ada di daerah tersebut. Kewenangan yang besar dibidang pengelolaan keuangan

¹ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, nuwunpriyono@untidar.ac.id

² Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, ari.nurul.fatimah@untidar.ac.id

³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, rismawirab@untidar.ac.id

⁴ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, sitiarifah@untidar.ac.id

daerah harus benar-benar ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah melalui program-program pembangunan yang tepat sasaran dan berkesinambungan.

Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom tentunya mempunyai kewenangan dalam kebijakan desentralisasi fiskal. Kewenangan yang ada harus mendukung bagi terciptanya kondisi keuangan pemerintah daerah yang mendukung program-program pembangunan. Kondisi keuangan daerah sangat tergantung dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan anggarannya. Terdapat beberapa sumber yaitu: sumber dari pengelolaan PAD maupun sumber lain yang dapat berasal dari dana transfer dari pemerintah pusat maupun sumber pembiayaan lainnya. Kondisi keuangan pemerintah daerah mencerminkan kekuatan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan keuangannya dalam rangka menjalankan program-program pembangunan. Kondisi keuangan yang baik memiliki sejumlah indikator, baik faktor internal maupun faktor eksternal pemerintah daerah.

Kota Magelang sebagai suatu daerah yang memiliki geografis berada ditengah-tengah Kabupaten Magelang perlu dianalisis seberapa jauh kondisi keuangan daerah tersebut. Di Kota Magelang terdapat usaha sektor jasa maupun sektor industri. Kota Magelang mempunyai luas wilayah 18,5364 KM². Sedangkan jika dilihat dari jumlah penduduknya Kota Magelang mempunyai jumlah penduduk 121.872 jiwa (BPS, 2018).

Penelitian ini akan menganalisis dan mengkaji sejauh mana kondisi keuangan pemerintah daerah jika dilakukan analisis dengan menggunakan model *Fiscal Trend Monitoring System (FTMS)* di Kota Magelang periode Tahun 2015-2019.

KAJIAN PUSTAKA

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan dianggap menjadi hal yang paling penting oleh pihak eksternal dalam menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun sesuai dengan SAP (Winarna dan Murni, 2014). Laporan keuangan pemerintah terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Laporan keuangan pemerintah daerah dapat diartikan sebagai kondisi saling berhubungan atau keterkaitan antar komponen dalam stau laporan maupun unsur dalam suatu komponen laporan keuangan pemerintah daerah (Firdaus dan Ritonga, 2018). Untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas, laporan keuangan daerah harus memenuhi empat syarat yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Pradono dan Basukianto, 2015).

Fiscal Trend Monitoring System (FTMS) Model

Fiscal Trend Monitoring System (FTMS) adalah sistem peringatan dini untuk memprediksi kondisi keuangan pemda melalui analisis tren untuk beberapa indikator. FTMS dikembangkan oleh *The International City/County Management Association (ICMA)* pada tahun 1980. ICMA mendefinisikan kondisi keuangan pemda sebagai kemampuan pemda untuk membiayai layanan secara berkelanjutan (Ritonga, 2014: 84). Dalam bukunya, Ritonga (2014) menjelaskan bahwa FTMS mengukur kondisi keuangan pemda menggunakan dua faktor yaitu faktor keuangan dan faktor lingkungan. Masing-masing faktor mempunyai indikator yang diberi formula berbeda-beda. Faktor keuangan terdiri dari indikator pendapatan, belanja, posisi operasi, struktur hutang, hutang di danani, dan kondisi aktiva tetap. Faktor lingkungan terdiri dari indikator kebutuhan masyarakat dan memberdaya, kendala antar pemerintah, resiko bencana, kultur politik, kondisi ekonomi eksternal.

Tabel 1. Tren Faktor Keuangan *Fiscal Trend Monitoring System*

Indikator	Sub Indikator	Formula	Trend Peringatan Dini
1. Pendapatan	Pendapatan per kapita	$\frac{\text{Pendapatan Operasional neto (harga konstan)}}{\text{Populasi}}$	↓↑

	Pendapatan pajak	Pendapatan pajak (harga konstan)	↓
	Surplus atau defisit pendapatan	<u>Surplus atau defisit pendapatan</u> Pendapatan operasional neto	↑
2. Belanja	Belanja per kapita	<u>Belanja operasional neto</u> Populasi	↑
	Belanja per fungsi	<u>Belanja operasional untuk fungsi</u> Total belanja operasional neto	↑
	Pegawai per kapita	<u>Jumlah pegawai pemda</u> Populasi	↑
	Belanja tetap	<u>Belanja Tetap</u> <u>Belanja operasional neto</u>	↑
3. Posisi operasi	Surplus atau defisit operasional	<u>Defisit or surplus operasional dana umum</u> Pendapatan operasional neto	↑
	Posisi operasional pemda	Modal kerja pemda atau pendapatan operasional	↓
	Likuiditas	<u>Kas dan investasi jangka pendek</u> Hutang jangka pendek	↓
4. Struktur hutang	Hutang jangka pendek	<u>Hutang jangka pendek</u> Pendapatan operasional neto	↑
	Hutang jangka panjang	<u>Hutang jangka panjang</u> Assesed valuation, populasi, atau pendapatan personal	↑
5. Hutang didanai	Hutang pensiun	<u>Hutang pensiun</u> Gaji dan tunjangan	↑
	Imbalan pasca kerja	<u>Total hutang untuk imbalan pasca kerja</u> Jumlah pegawai pemda	↑
6. Kondisi aktiva tetap	Upaya pemeliharaan	<u>Belanja pemeliharaan aset tetap (harga konstan)</u> Jumlah kuantitas aset	↓
	Belanja modal	<u>Belanja modal dari dana operasional</u> Belanja operasional neto	↓

Sumber: Ritonga (2014)

Tabel 2. Tren Faktor lingkungan *Fiscal Trend Monitoring System*

Indikator	Sub Indikator	Formula	Trend Peringatan Dini
1. Kebutuhan masyarakat dan sumber daya	Jumlah populasi	Jumlah populasi	↑↓
	Kepadatan penduduk	<u>Jumlah populasi</u> Luas wilayah dalam mil persegi	↓
	Umur (populasi bawah umur 18 dan lebih 64)	<u>Jumlah populasi dibawah 18 atau lebih 64</u> Jumlah populasi	↑
	Rumah tangga miskin atau penerima bantuan publik	<u>Rumah tangga miskin/penerima bantuan publik</u> Rumah tangga dalam ribuan	↑

	Kepemilikan rumah	Tingkat kepemilikan rumah	↓
	Pengangguran		↑
	Jumlah lapangan kerja di masyarakat		↓
2. Kendala antar pemerintah	Belanja wajib	<u>Belanja wajib</u> Total belanja operasional	↑

Sumber: Ritonga (2014)

Pendapatan Daerah

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah, pendapatan daerah dapat bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan_LRA adalah penerimaan kas oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah (PSAP No 2. Paragraf 7 dalam Ritonga dan Suhartono, 2016). Sedangkan pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali (PSAP No. 12, paragraph 8).

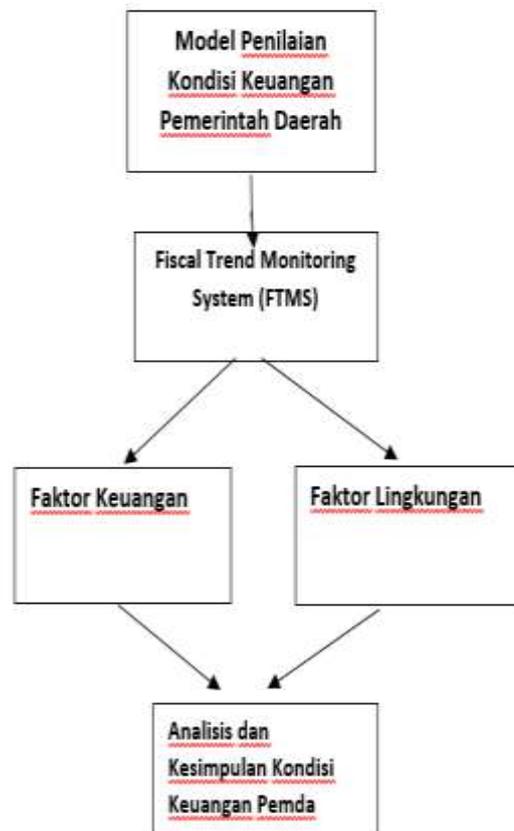
Belanja Daerah

Menurut PSAP No 02, paragraph 34 dalam Ritonga dan Suhartono (2016) belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi: belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga. Sedangkan klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh: belanja pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup dan perumahan dan permukiman

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maizunati (2017) mengenai kondisi keuangan Kota Magelang, membuktikan bahwa monitoring kesehatan keuangan secara periodik merupakan hal yang wajib dilakukan untuk membentuk suatu *early warning system* terhadap berbagai kemungkinan di masa mendatang baik dari sisi ekonomi makro maupun sosial politik. Melalui analisis deskriptif dengan metode indeks komposit kondisi keuangan dan klasterisasi Pemerintah Daerah disimpulkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan di Kota Magelang cukup baik di antara Kota-kota dalam Klaster 3. Suryani dan Faizal (2016) mengenai kondisi keuangan Kabupaten/Kota di Aceh dan Sumatera Utara menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan analisis data penelitian dapat disimpulkan bahwa kabupaten/ kota di Aceh memiliki tingkat kondisi keuangan daerah yang lebih baik dari pada kabupaten/kota di Sumatera Utara. Suwanto (2016), yang meneliti mengenai kondisi keuangan pemda dengan metode klaster. Dalam penelitian terdapat dua klaster sehat dan tidak sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam klaster yang tidak sehat unggul pada komponen luas wilayah dan indeks kemahalan konstruksi serta dominan pada sektor pertanian dan pariwisata. Sedangkan pada klaster kedua dengan kriteria sehat, unggul signifikan disemua komponen DAU dengan pengecualian pada komponen luas wilayah dan indeks kemahalan konstruksi.

Model Konseptual



Gambar 1. Model Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data yang diperlukan adalah APBD, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Operasional. Data keuangan juga diperoleh melalui website: sibata.magelangkab.go.id dan ppid.magelangkota.go.id. Selain itu data juga diperoleh dari website Kantor Badan Pusat Statistik (BPS).

Pendekatan, Spesifikasi dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2009), dalam penelitian ini hasil akhirnya bukan sekedar menghasilkan data atau informasi yang sulit dicari melalui metode kuantitatif, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi-informasi yang bermakna, bahkan hipotesis atau ilmu baru yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah. Dalam metode ini data penelitian dapat berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Dalam metode penelitian ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Magelang.

Data Penelitian

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa:

- 1) APBD Kota Magelang selama 5 tahun terakhir (2015-2019).
- 2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Magelang selama 5 tahun terakhir (2015-2019).
- 3) Laporan Operasional Kota Magelang selama 5 tahun terakhir (2015-2019).
- 4) Neraca Kota Magelang selama 5 tahun terakhir (2015-2019).

Selain data tersebut diatas juga diperlukan data sebagai berikut:

- 1) Jumlah populasi Kota Magelang
- 2) Luas wilayah Kota Magelang
- 3) Data rumah tangga miskin/penerima bantuan publik Kota Magelang
- 4) Data inflasi dan data tenaga kerja di wilayah Kota Magelang

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis dalam penelitian menggunakan statistic deskriptif, yaitu: menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, rata-rata dan perhitungan persentase (Sugiyono, 2009). Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan statistik deskriptif, dilakukan pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap rasio yang ada dalam faktor keuangan yang telah disebutkan ditabel 1 diatas dan juga rasio dari faktor lingkungan yang telah disebutkan pada tabel 2. Penilaian faktor keuangan dan faktor lingkungan Pemda Kota Magelang menggunakan *Fiscal Trend Monitoring System* (FTMS). Hasil dari perhitungan tersebut, kemudian dianalisis dari tahun ke tahun terhadap kondisi keuangan Pemda Kota Magelang

HASIL dan PEMBAHASAN.

Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini tidak semua indikator yang ada dalam model tersebut akan menjadi bahan acuan dalam melakukan analisis kondisi keuangan pemerintah daerah, karena adanya keterbatasan data penelitian. Namun data-data penelitian yang ada sudah cukup digunakan dalam menilai kondisi keuangan pemerintah Kota Magelang dengan model FTMS. Data yang dilakukan penilaian model adalah data selama 5 tahun berturut-turut yaitu: tahun 2015-2019.

Terdapat 4 indikator faktor-faktor keuangan yaitu: pendapatan, belanja, posisi operasi dan struktur hutang. Dari ke 4 indikator tersebut terdapat 9 sub indikator dari faktor keuangan. Sedangkan untuk faktor lingkungan terdapat 1 indikator kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang meliputi 5 sub indikator.

Faktor Keuangan Kota Magelang

Kondisi keuangan Kota Magelang dilakukan penilaian dengan menggunakan model FTMS dengan melihat faktor keuangan dari tahun 2015-2019. Berikut ini akan diuraikan data-data hasil penelitian model FTMS tersebut:

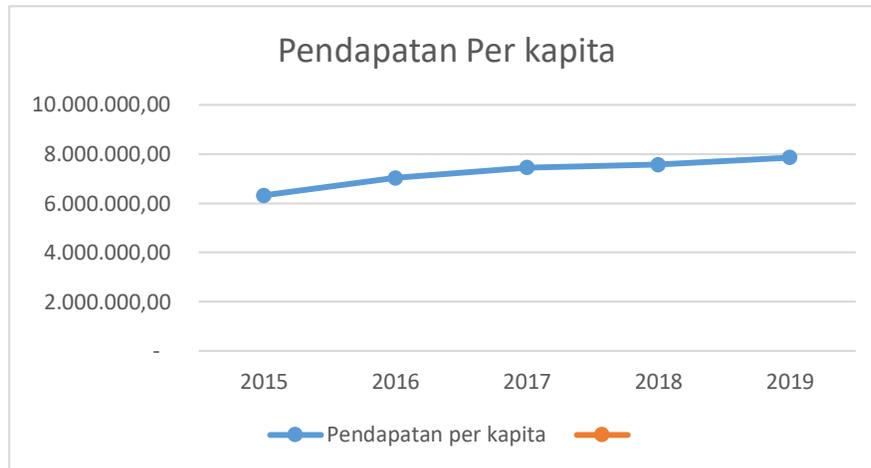
Tabel 3. Faktor Keuangan Kota Magelang

Indikator	Sub Indikator	Formula	2015	2016	2017	2018	2019	Trend Peringatan Dini
			Hasil	Hasil	Hasil	Hasil	Hasil	
1. Pendapatan	Pendapatan per kapita	Pendapatan Operasional neto (harga konstan)	6,322,793	7,030,398	7,455,789	7,566,777	7,864,439	↓↑
		Populasi						
	Pendapatan pajak	Pendapatan pajak (harga konstan)	26,003,904,567	25,921,432,727	31,232,410,736	34,567,922,597	41,075,938,373	↓
	Surplus atau defisit pendapatan	Surplus atau defisit pendapatan	0.00	0.11	0.16	0.12	0.14	↑
		Pendapatan operasional neto						
2. Belanja	Belanja per kapita	Belanja operasional neto	5,015,571	5,976,110	7,255,544	7,703,811	8,467,627	↑
		Populasi						
	Belanja per fungsi	Belanja operasional untuk fungsi (barang dan jasa)	0.35	0.46	0.35	0.39	0.38	↑
		Total belanja operasional neto						
	Belanja tetap	Belanja Tetap (belanja pegawai)	0.53	0.53	0.06	0.06	0.06	↑
		Belanja operasional neto						
3. Posisi operasi	Surplus atau defisit operasional	Defisit or surplus operasional dana umum	0.50	0.49	0.49	0.48	0.47	↑
		Pendapatan operasional neto						
	Likuiditas	Kas dan investasi jangka pendek	112	29	102	65	55	↓
		Hutang jangka pendek						
4. Struktur hutang	Hutang jangka pendek	Hutang jangka pendek	0.0022	0.0069	0.0020	0.0022	0.0020	↑
		Pendapatan operasional neto						

Sumber: sibata.magelangkab.go.id dan ppid.magelangkota.go.id. (data olahan)

Sub indikator pendapatan per kapita pada Kota Magelang selama 5 tahun berturut turut dari tahun 2015-2019 mengalami trend peningkatan, walaupun peningkatannya rata-rata hanya sebesar 6 %. Akan tetapi sudah menggambarkan tren peningkatan yang positif. Dalam arti bahwa sub indikator pendapatan perkapita pada tren yang menguntungkan. Sub indikator pendapatan pajak diatas terlihat bahwa pada tahun 2015-2019 terjadi tren yang diharapkan dikarenakan pendapatan pajaknya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2015-2016 hanya sedikit terjadi penurunan sekitar 3%. Akan tetapi pada tahun 2017-2019 trennya meningkat yang berarti penilaian kondisi keuangan pemda Kota Magelang pada tren yang menguntungkan.

Grafik 1. Sub Indikator Pendapatan Per Kapita



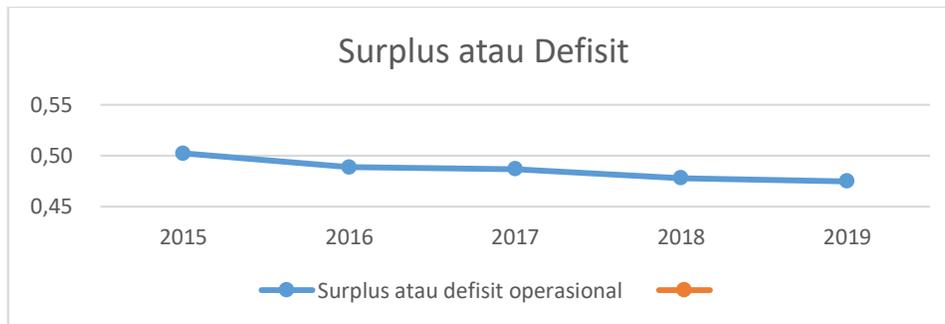
Sub indikator surplus atau defisit pendapatan mempunyai tren yang meningkat. Dari tahun 2015-2017 selalu mengalami kenaikan yang berarti terjadi tren yang tidak menguntungkan. Sedangkan ditahun 2017-2018 mengalami penurunan yang berarti kondisi keuangan dalam tren yang menguntungkan. Dan pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan lagi yang berarti berada pada tren yang kurang menguntungkan. Sub indikator belanja per kapita pada tahun 2015-2019 menunjukkan tren yang tidak diharapkan karena nilai belanja perkapita selalu mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari besaran nilai belanja operasional neto (harga konstan) yang terus mengalami peningkatan nilainya jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk yang ada di Kota Magelang.

Grafik 2. Sub Indikator Pendapatan Pajak



Sub indikator belanja per fungsi dari tahun 2015-2016 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan terdapat tren yang tidak diharapkan. Kemudian di tahun 2016-2019 mengalami tren yang menurun yang berarti masuk dalam kategori tren yang menguntungkan. Sub indikator belanja tetap pada tahun 2016 ke 2017 menunjukkan tren yang menguntungkan karena nilainya mengalami penurunan. Namun pada tahun berikutnya menunjukkan tren yang kurang menguntungkan karena nilainya mengalami peningkatan walaupun angkanya relatif kecil. Sub indikator surplus atau defisit operasional menunjukkan tren yang menguntungkan. Pada tahun 2015-2019 menunjukkan tren dengan nilai yang selalu mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan kondisi keuangan pemda dari sisi sub indikator surplus atau defisit operasional menguntungkan.

Grafik 3. Sub Indikator Surplus atau Defisit Operasional



Sub indikator likuiditas menunjukkan dua nilai tren baik yang menguntungkan maupun tren yang tidak menguntungkan. Pada tahun 2015-2016 menunjukkan tren yang tidak menguntungkan karena nilai likuiditas yang dimiliki Kota Magelang mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2016-2017 tren likuiditasnya mengalami kenaikan yang menunjukkan nilai menguntungkan bagi kondisi keuangan pemerintah daerah. Dan di tahun 2018-2019 mengalami tren yang kurang menguntungkan karena nilai mengalami peningkatan lagi. Sub indikator hutang jangka pendek pada Tahun 2015-2016 menunjukkan tren yang tidak menguntungkan karena mengalami peningkatan yang cukup tajam. Kemudian tahun 2017-2019 mengalami tren yang menguntungkan karena nilainya mengalami penurunan. Kemudian kondisi keuangan Kota Magelang jika dilihat dari faktor-faktor lingkungan, terdapat satu indikator kebutuhan masyarakat dan sumber daya manusia yang mencakup 5 sub indikator.

Faktor Lingkungan

Dibawah ini adalah data faktor lingkungan Kota Magelang dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 4. Faktor Lingkungan Kota Magelang

Indikator	Sub Indikator	Formula	Trend Peringatan Dini	2015	2016	2017	2018	2019
				Kota Magelang				
1. Kebutuhan masyarakat dan sumber daya	Jumlah populasi	Jumlah populasi	↑↓	131,703.00	120,952.00	121,205.00	121,673.00	121,872.00
	Kepadatan penduduk	Jumlah populasi	↓	131,703.00	120,952.00	121,205.00	121,673.00	121,872.00

		Luas wilayah dalam mil persegi		18.12	18.12	18.12	18.12	18.12
	Umur (populasi bawah umur 18 dan lebih 64	Jumlah populasi dibawah 18 atau lebih 64	↑	83,492.00	74,692.00	84,263.00	75,305.00	75,711.00
		Jumlah populasi		131,703.00	120,952.00	121,205.00	121,673.00	121,872.00
	Pengangguran		↑	2,252.00	3,927.00	3,927.00	4,193.00	3,238.00
	Jumlah lapangan kerja di masyarakat		↓	9.00	9.00	9.00	9.00	14.00

Sumber: BPS (Olahan)

Sub indikator populasi diatas menunjukkan bahwa faktor lingkungan pada indikator jumlah penduduk atau populasi yang ada di Kota Magelang dari tahun ketahun mengalami tren penurunan yang berarti bisa menguntungkan atau tidak menguntungkan. Pada sub indikator populasi tren bisa naik maupun turun, tergantung apabila kenaikan jumlah penduduk diimbangi dengan peningkatan pendapatan perkapita. Sub indikator kepadatan penduduk, terlihat bahwa kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Magelang selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya tren yang kurang menguntungkan bagi penilaian kondisi keuangan khususnya faktor lingkungan.

Sub indikator umur, terlihat bahwa jumlah penduduk yang mempunyai umur dibawah 18 tahun dan diatas 64 tahun menunjukkan tren yang kurang menguntungkan dan menguntungkan karena terjadi dua tren naik dan turun. Pada tahun 2015-2018 jumlahnya selalu mengalami peningkatan yang menandakan dalam posisi tren yang kurang menguntungkan sedangkan di tahun 2019 mengalami penurunan yang berarti dalam tren yang menguntungkan.

Sub indikator pengangguran menunjukkan adanya tren yang kurang menguntungkan dan tren yang menguntungkan bagi penilaian kondisi keuangan pemerintah daerah pada faktor lingkungan khususnya pada tahun 2015-2019 karena jumlah pengangguran mengalami peningkatan dan juga penurunan. Pada tahun 2015-2018 menunjukkan tren yang kurang menguntungkan karena angka pengangguran mengalami peningkatan. Akan tetapi ditahun 2018-2019 mengalami penurunan yang berarti dalam tren yang menguntungkan. Sub indikator jumlah lapangan kerja di masyarakat diatas menunjukkan adanya tren yang menguntungkan bagi penilaian kondisi keuangan pemerintah daerah pada faktor lingkungan khususnya pada tahun 2015-2019 karena jumlah lapangan kerja yang tersedia dimasyarakat mengalami peningkatan.

Grafik 4. Sub Indikator Lapangan Kerja



Pembahasan

Tren Model FTMS Faktor Keuangan Kota Magelang tahun 2015-2019

Dalam model FTMS terdapat 4 indikator utama faktor keuangan yang mencakup 9 sub indikator. Dari 9 sub indikator tersebut, terdapat 8 sub indikator yang masuk tren menguntungkan bagi penilaian kondisi

keuangan Kota Magelang dan 1 sub indikator yang termasuk dalam tren tidak menguntungkan. Adapun ke 9 indikator yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Tren Model FTMS Faktor Keuangan Kota Magelang tahun 2015-2019

No	Sub Indikator	Tren	Keterangan
1	Pendapatan per kapita	Menguntungkan	2015-2019
2	Pendapatan pajak	Menguntungkan	2015-2019
3	Surplus atau defisit pendapatan	Menguntungkan	2017-2018
4	Belanja per kapita	Tidak Menguntungkan	-
5	Belanja per fungsi	Menguntungkan	2016-2019
6	Belanja tetap	Menguntungkan	2016-2017
7	Surplus atau defisit operasional	Menguntungkan	2015-2019
8	Likuiditas	Menguntungkan	2016-2017
9	Hutang jangka pendek	Menguntungkan	2017-2019

Jika dilihat pada tabel diatas, terlihat jelas bahwa terdapat 3 sub indikator yang mempunyai tren menguntungkan selama 5 tahun berturut-turut yaitu: sub indikator Sub indikator Pendapatan per kapita, Pendapatan pajak dan Surplus atau defisit operasional. Untuk ketiga sub indikator ini perlu ditingkatkan lagi jumlah penerimaan pendapatannya baik pendapatan operasional neto maupun pendapatan pajak yang ada di Kota Magelang. Sedangkan 5 sub indikator seperti: Surplus atau defisit pendapatan, Belanja per fungsi, belanja tetap, likuiditas dan hutang jangka pendek mempunyai tren yang menguntungkan hanya beberapa tahun saja. Kelima sub indikator tersebut harus menjadi perhatian pemerintah Kota Magelang, sehingga dapat memiliki tren yang menguntungkan dari tahun ke tahun. Sedangkan 1 sub indikator belanja per kapita mempunyai tren yang tidak menguntungkan. Tren ini disebabkan karena rasio belanja operasional neto jika dibandingkan dengan jumlah penduduk nilainya selalu mengalami peningkatan, artinya belanja operasional neto yang dikeluarkan dari tahun ke tahun jumlahnya besar apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Tabel 6. Tren Model FTMS Faktor Lingkungan Kota Magelang tahun 2015-2019

No	Sub Indikator	Tren	Keterangan
1	Populasi (jumlah penduduk)	Menguntungkan	-
2	Lapangan Kerja	Menguntungkan	2015-2019
3	Kepadatan Penduduk	Tidak Menguntungkan	-
4	Umur	Menguntungkan	2019
5	Pengangguran	Menguntungkan	2018-2019

Dalam tabel diatas terlihat jelas bahwa dalam indikator faktor lingkungan dari 1 indikator kebutuhan masyarakat dan sumber daya, terdapat 4 sub indikator yang menguntungkan dan 1 sub indikator yang tidak menguntungkan. Sub indikator Populasi mempunyai tren yang meningkat jika diimbangi dengan peningkatan pendapatan perkapita. Sedangkan lapangan kerja mempunyai tren menguntungkan 5 tahun berturut turut, artinya di Kota Magelang jumlah lapangan kerja selalu tersedia dengan jumlah yang mengalami peningkatan daritahun ke tahun. Sedangkan dari sub indikator umur hanya di tahun 2019 yang mempunyai tren yang menguntungkan, artinya bahwa di tahun 2019 jumlah populasi yang produktif mengalami kenaikan. Sedangkan di tahun 2018-2019 jumlah pengangguran di Kota Magelang mengalami tren yang diharapkan yaitu: jumlahnya menurun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Model *Fiscal Trend Monitoring System* (FTMS) Kota Magelang Tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa terdapat 4 indikator pada faktor keuangan yang terdiri dari 9 sub indikator dan 1 indikator pada faktor lingkungan, yang terdiri dari 5 sub indikator
2. Model *Fiscal Trend Monitoring System* (FTMS) faktor keuangan Kota Magelang, dari 9 sub indikator, 3 sub indikator mempunyai tren menguntungkan selama 5 tahun berturut-turut, 5 sub indikator mempunyai tren menguntungkan hanya beberapa tahun diperiode pengamatan dan 1 sub indikator mempunyai tren tidak menguntungkan
3. Model *Fiscal Trend Monitoring System* (FTMS) faktor lingkungan Kota Magelang, dari 5 sub indikator, 1 sub indikator lapangan kerja mempunyai tren menguntungkan selama 5 tahun berturut-turut, 3 sub indikator mempunyai tren menguntungkan pada beberapa tahun periode pengamatan, dan 1 sub indikator mempunyai tren yang tidak menguntungkan

Saran

1. Pemerintah Kota Magelang dapat meningkatkan kinerja keuangannya pada sub indikator-sub indikator keuangan yang dalam tren kurang menguntungkan sehingga kondisi keuangan pemerintah daerah tersebut dapat menguntungkan.
2. Dalam penelitian yang akan datang lebih melengkapi data penelitian tidak hanya menggunakan model FTMS, akan tetapi menggunakan model yang lain dalam penilaian kondisi keuangan pemda tersebut.

PUSTAKA ACUAN

- BPS.2011. Kota Magelang Dalam Angka tahun 2019
- BPS.2020. Kabupaten Magelang Dalam Angka tahun 2020
- Firdaus, M. A., dan Ritonga, I. T. (2018). Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Akuntabilitas Publik*, 1(1), 68. <https://doi.org/10.22146/jaap.35336>
- Maizunati, Nur Afiah. 2017. Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Dalam Klaster Kota Di Jawa-Bali. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*. Vol 2. No 2 April 2017. Untidar
- Pradono, F. C., dan Basukianto. (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 22(2), 1–13.
- Ritonga, Irwan Taufiq.2014. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Cetakan 1. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.*
- Ritonga, IT dan Suhartono, E. 2016. Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Lanjutan. Cetakan 1. *Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta*
- Sugiyono. 2009. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RdnD. *Cetakan kedelapan. Bandung: Alfabeta*
- Surjono, W., dan Nova Roslina Firdaus, N. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan (Dppk) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 1357–1368. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i1.6737>
- Suryani dan Faisal, HB. 2016. Analisis Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh Dan Di Sumatera Utara. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Maret 2016, Hal. 63 – 71 Vol. 23, No.1 63 ISSN: 1412-3126
- Suwanto, Agus. 2016. Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Dengan Metode Klaster. *Tesis. Maksi. FEB UNS*
- Suyono, N. A. (2016). Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Wonosobo), 237–248.
- Winarna, J., dan Murni, S. (2014). Persepsi User Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Eks Karisidenan Surakarta). *Journal of Rural and Development*, V(1), 81–96.